

Pengembangan BUMDes untuk Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa Tonjong Bogor

Setyo Kuncoro¹, Dwi Rahmawati^{2 @}, Dwi Windradini B.P³

^{1,2} Universitas Terbuka

³ Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Email: dwir@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki legalitas setara badan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes, khususnya di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis komunitas, studi ini mengkaji BUMDes Tonjong sebagai studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh desa di kecamatan tersebut telah membentuk BUMDes, pengembangannya masih minim karena berbagai kendala, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta lemahnya strategi pemasaran dan dukungan masyarakat. Kemitraan strategis dengan pelaku UMKM, Karang Taruna, dan sektor swasta menunjukkan potensi pengembangan usaha yang menjanjikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengurus, optimalisasi peran media, serta penguatan kolaborasi multi-stakeholder untuk meningkatkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

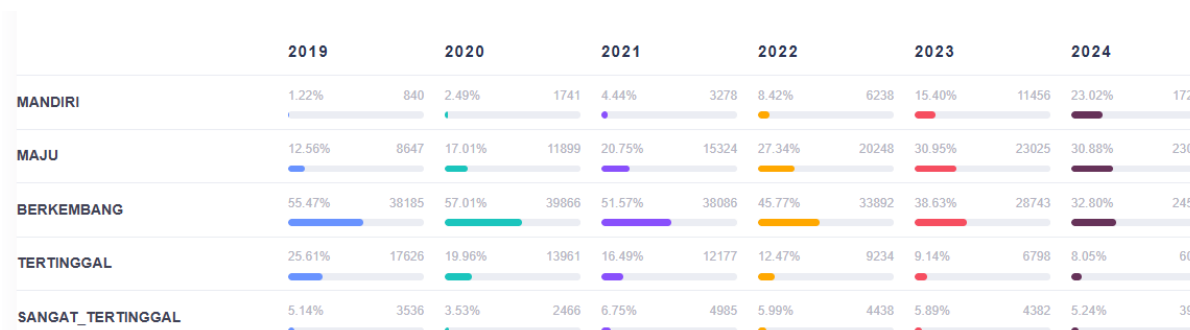
Kata kunci: BUMDes, pembangunan desa, ekonomi lokal, kemitraan, Community Based Research

1. PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan melalui berbagai kebijakan. Salah satu inisiatif yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ([Harmiati et al., 2017](#)). BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang hanya berlaku di desa masing-masing. Legalitas BUMDes semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021, yang menetapkan BUMDes sebagai entitas hukum baru yang setara dengan badan hukum lainnya seperti koperasi, yayasan, atau perseroan. Dengan demikian, meskipun pembentukan BUMDes didasarkan pada Perdes, keberadaannya kini diakui secara hukum setara dengan badan usaha berbadan hukum lainnya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditujukan untuk menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi di tingkat lokal desa. Upaya ini bertumpu pada analisis terhadap kebutuhan, potensi, serta kapasitas desa, dan didukung oleh penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk dana serta aset desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dasar pendirian BUMDes sebagai pendorong utama pembangunan desa berakar pada inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat desa, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sama, partisipasi aktif, serta pemberdayaan masyarakat desa (Ihsan, 2018).

BUMDes berperan dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, serta mendorong aktivitas usaha masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh desa, yang bersumber dari aset desa, penyediaan layanan, serta kegiatan usaha lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dukungan terhadap keberadaan BUMDes semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta arah pembangunan di wilayahnya. Peraturan ini memberi peluang bagi desa untuk mandiri dalam pengelolaan baik terhadap pemerintah maupun potensi ekonomi yang dimilikinya. Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas tentang penyelenggaraan BUMDes, implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh desa di Indonesia. Bahkan, di sejumlah wilayah, pelaksanaan BUMDes masih belum efektif dan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meskipun regulasinya telah diterbitkan sejak tahun 2014 (Lestari et al., 2023).



Gambar 1. Indeks Desa Membangun

Source: (<https://idm.kemendesa.go.id/>)

Data Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif dalam perkembangan status desa di Indonesia. Desa dengan status mandiri mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya 1,22% (840 desa) pada tahun 2019 menjadi 23,02% (17.200 desa) pada tahun 2024. Begitu pula dengan desa maju, yang naik dari 12,56% (8.647 desa) menjadi 30,88% (23.025 desa) pada periode yang sama. Sementara itu, jumlah desa berkembang cenderung menurun, dari 55,47% (38.185 desa) di tahun 2019 menjadi 32,80% (24.500 desa) pada tahun 2024. Penurunan ini bukan berarti kemunduran, melainkan karena banyak desa berkembang yang telah naik kelas menjadi desa maju dan mandiri.

Sebaliknya, desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan yang signifikan. Desa tertinggal turun dari 25,61% (17.626 desa) di tahun 2019 menjadi hanya 8,05% (sekitar 6.000 desa) pada tahun 2024. Sedangkan desa sangat tertinggal menyusut drastis dari 5,14% (3.536 desa) menjadi hanya 5,24% (39 desa) pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa telah memberikan dampak yang nyata dan positif. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan desa dalam mendorong kemandirian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Banyak pihak mendorong agar setiap desa segera membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi desa. Namun, kenyataannya masih banyak desa yang belum aktif membentuk BUMDes, termasuk di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Di kecamatan tersebut, seluruh 7 desa telah membentuk BUMDes, tetapi semuanya masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum ada yang menunjukkan kemajuan signifikan. BUMDes Desa Tonjong merupakan salah satu dari tujuh desa di Tajur Halang. BUMDes Desa Tonjong telah berdiri sejak tahun binaan dari tim Abdimas FHISIP Universitas Terbuka tahun 2018, tetapi setelah adanya pergantian kepala desanya, dan pergantian pengurus BUMDes, aktivitas usahanya yang sudah mulai berjalan, saat ini mengalami kemunduran. Harapan untuk menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa akhirnya ikut terhenti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang menyebabkan desa-desa di wilayah kecamatan Tajur Halang belum mengembangkan BUMDesnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan Community Based Research yang dilaksanakan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih luas mengenai masyarakat desa pada tingkat mikro, meso, dan makro, khususnya terkait dengan potensi desa secara menyeluruh serta menilai arah dan motivasi pembangunan ekonomi pedesaan. Objek dalam penelitian ini adalah BUMDes Desa Tonjong yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion atau FGD), serta analisis kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis).

Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan sikap dan perilaku stakeholders dalam kaitannya dengan pengembangan BUMDes. Data primer dan data sekunder tersebut dapat digunakan untuk memberikan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Data primer diambil dari lapangan secara langsung, dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Melalui informan ini, peneliti dapat menggali informasi-informasi secara mendalam yang berkaitan dengan objek penelitian, dan mengungkap makna yang tersembunyi, sehingga dapat menyusun pola keterkaitan antara bagian-bagian dari objek penelitian.

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada tiga tahapan utama sebagaimana dijelaskan oleh [Darmadi & Azwar \(2011\)](#), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan merangkum informasi penting dari data yang diperoleh, dengan memusatkan perhatian pada tema dan pola yang muncul untuk memberikan pemahaman yang lebih

terarah mengenai potensi desa dan arah pengembangannya. Penyajian data dilakukan melalui berbagai format seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir (flowchart), atau narasi. Fokus utama dari penyajian ini tetap pada potensi desa dan strategi pengembangannya. Jika informasi yang ditampilkan dianggap masih berlebihan, proses reduksi dapat diulang. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antar tema. Kesimpulan awal yang masih bersifat tentatif akan diuji kembali melalui pengumpulan data tambahan di lapangan serta pelaksanaan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama narasumber yang relevan. Jika dibutuhkan, wawancara tambahan dengan informan juga dapat dilakukan untuk melengkapi informasi. Hasil akhir dari kesimpulan ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, dengan dukungan data yang kuat dan konsisten ([Salihin, 2021](#)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Usaha BUMDes

Dalam dunia usaha, menjalin kemitraan menjadi strategi penting untuk mengembangkan bisnis, termasuk bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Tajur Halang. Secara umum, BUMDes di wilayah ini telah melakukan kerja sama dengan berbagai mitra sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, BUMDes Desa Sasak Panjang mengembangkan unit usaha pertamanan dengan bermitra langsung bersama para petani tanaman hias di desanya. Selain itu, BUMDes dari Desa Sasak Panjang, Citayam, dan Tonjong juga mengelola usaha layanan *Payment Point Online Banking* (PPOB), sebuah sistem pembayaran tagihan listrik, pulsa, dan layanan lainnya yang terhubung secara real time dengan Bank Jawa Barat (BJB), sehingga memungkinkan proses rekonsiliasi data yang cepat dan akurat.

Kemitraan dengan pelaku UMKM juga telah dilakukan, khususnya oleh BUMDes Tonjong yang menyediakan ruang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produk-produknya. Sejumlah UMKM kuliner bahkan telah tergabung dalam usaha kuliner yang dikelola BUMDes Tonjong. Tidak hanya menyediakan tempat, BUMDes juga memberikan pendampingan berupa perhitungan biaya produksi, penentuan harga jual, peningkatan kualitas produk, hingga strategi pengemasan. Sementara itu, BUMDes Citayam menjalin kerja sama dengan distributor sebagai agen penyalur beras, yang sasaran pemasarannya adalah aparaturnya dan perangkat desa.

BUMDes Citayam juga tengah merintis usaha pengolahan sampah rumah tangga dengan menggandeng mitra bisnis yang memberikan pelatihan manajemen dan teknologi, menyediakan mesin pengolahan sampah, serta membeli hasil olahan berupa bijih plastik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan nilai ekonomis yang dapat dihasilkan dari pengolahan tersebut.

Tak hanya itu, BUMDes Citayam juga menjalin kemitraan dengan PSSI dalam pemanfaatan lapangan sepak bola desa untuk berbagai kegiatan pertandingan antar desa. Sementara BUMDes Tonjong bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku UMKM untuk mengembangkan sektor wisata berbasis situ sebagai destinasi wisata air dan kuliner. Selain menjalin kerja sama eksternal, antar BUMDes di wilayah Kecamatan Tajur Halang juga saling bermitra dalam kegiatan produksi, promosi, penjualan, hingga penyediaan paket wisata secara bersama-sama.

Pengetahuan yang cukup terhadap filosofi BUMDes dan jiwa pejuang/perintis merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Pengurus BUMDes

harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan fungsi BUMDes, serta memiliki semangat untuk membangun dan mengembangkan BUMDes. Selain pengetahuan yang cukup terhadap filosofi BUMDes, pengurus BUMDes juga harus memiliki jiwa pejuang/perintis. Jiwa ini diwujudkan dalam beberapa karakteristik, yaitu totalitas, pengabdian, kewirausahaan, mau berkorban, berani mengambil risiko, kreatif, dan jujur. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, diharapkan pengurus BUMDes dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa BUMDes ke arah yang lebih maju.

Program Pemasaran

Pemanfaatan berbagai jenis media, baik media konvensional maupun digital, berperan signifikan dalam mendukung peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemanfaatan media oleh BUMDes yang diteliti masih terbatas. Website yang dimiliki, misalnya, hanya terhubung dengan aplikasi WhatsApp dan belum menerapkan strategi optimasi mesin pencari (SEO), sehingga belum mampu menarik kunjungan secara maksimal. Media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi berpotensi memperkuat citra BUMDes serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Website yang dirancang informatif dan mudah diakses juga dapat menjadi sarana efektif dalam mempromosikan berbagai aktivitas dan pencapaian BUMDes kepada publik. Sementara itu, media sosial seperti Facebook dan Instagram dapat menjadi alat strategis untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat, memperoleh masukan, serta melaksanakan promosi yang lebih spesifik dan menyasar. Oleh karena itu, BUMDes perlu mengoptimalkan penggunaan media sosial guna menjangkau pasar yang lebih luas secara efektif.

Dukungan Masyarakat

Dukungan dari masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pengembangan BUMDes. Tanpa keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, upaya untuk memajukan BUMDes akan menghadapi berbagai kendala. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, BUMDes Sasak Panjang telah mengembangkan usaha di bidang pertamanan dengan memanfaatkan tanaman hias sebagai bahan utama. Untuk mendukung usaha ini, BUMDes menjalin kemitraan dengan para petani tanaman hias yang cukup banyak tersebar di desa tersebut.

BUMDes Citayam juga menunjukkan bentuk kolaborasi serupa dengan menjalin kerja sama bersama Karang Taruna dalam pengelolaan lapangan sepak bola. Sementara itu, BUMDes Tonjong tengah membangun kemitraan dengan Karang Taruna serta pemilik venue dalam rangka mengembangkan destinasi wisata air dan kuliner di wilayahnya. Peran tokoh masyarakat menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks BUMDes Citayam yang sedang menginisiasi program pengelolaan sampah. Masyarakat desa setempat umumnya belum menyadari potensi ekonomi dari sampah rumah tangga bila dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat diperlukan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga sampah tersebut dapat diubah menjadi sumber nilai ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan BUMDes antara lain adalah sumberdaya yang baik, dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi-potensi

desa yang lainnya. Selain itu adanya dukungan baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes (Ihsan, 2018). Sementara menurut Lestari et al., (2023); Umar & Anggraeni, (2023) faktor penghambat pengembangan BUMDes adalah anggaran, di mana keberadaan BUMDes dalam melaksanakan programnya dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, dan juga sumber daya manusia, BUMDes yang belum memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan BUMDes, sehingga pengurus juga sering mengalami kebingungan untuk menjalankan tugasnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan BUMDes di Kecamatan Tajur Halang masih menghadapi berbagai tantangan meskipun secara regulatif dan kelembagaan telah terbentuk. Faktor utama yang menghambat kemajuan BUMDes meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan media dan strategi pemasaran. Di sisi lain, potensi keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya lokal, dukungan dari pemerintah di berbagai tingkat, serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara BUMDes dan berbagai pihak seperti UMKM, Karang Taruna, serta institusi lain membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas dan berkelanjutan. Untuk menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa, diperlukan penguatan kapasitas manajerial, edukasi publik, serta pendekatan pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “*Mode 3’and’Quadruple Helix’*”: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.
- Dewandaru, B., & Purnamaningsih, N. (2016). Strategi Dalam Memajukan Industri Kreatif Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Pada Kesenian Jaranan Di Kota Kediri). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiiri*, 1(2).
- Harmiati, A. A. Z., Zuhakim, A. A., & Sos, S. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Retrieved from: *Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN*.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>

- Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 207–224.
- Lestari, O. A., Herlan, Hasanah, Musa, P., & Rahmaniah, S. E. (2023). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TIKALA DESA PASTI JAYA KECAMATA SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG. *Komunitas*, 14(1), 10–24. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i1.7169>
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 96. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3937>
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344.
- Umar, & Anggraeni, R. N. (2023). *The Role of BUMDES in Increasing Village Original Income and the Village Community Economy in Sigi Regency. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(3), 332–336. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i3.3971>
- Warsono, H. (2009). *Networking dalam Intergovernmental Management. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 78–91.

Buku

- BPS. (2023, January 16). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. BPS.
- Chandra, Y., Shang, L., Chandra, Y., & Shang, L. (2019). *Qualitative research: An overview. Qualitative Research Using R: A Systematic Approach*, 1–19.
- Darmadi, H., & Azwar, S. (2011). Metode Penelitian. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar Azwar. Pustaka Pelajar Azwar.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80.
- Marjukah, A., Prasetyo, J., & Setyabudi, A. (2021). Peran Kolaborasi Bisnis Dan Digital Marketing Terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Masa Pandemic Covid-19. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*, 2(1), 780–789.
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3(01).
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189.
- Rahardjo, S., & Gudnanto, S. P. (2022). Pemahaman Individu teknik nontes. *Prenada Media*.
- Rauf, R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa. *Valuta*, 2(2), 208–220.
- Saldana, J. (2014). *Thinking qualitatively: Methods of mind*. SAGE publications.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.

Wijaya, F. S. (2015). Kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan.